PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)**

UNIT KERJA : **SEKRETARIAT UTAMA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RINI AGUSTIANI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS UTAMA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)**
3. NHK : **478836**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.346.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/45 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 270 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
5. Tanah Seluas 334 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 167.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 545 m2/200 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 2.725.000.000
7. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 37.500.000
8. Tanah Seluas 328 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 429.000.000
9. Tanah Seluas 596 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 298.000.000
10. Tanah Seluas 530 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **4.500.000**

1. MOTOR, Honda Solo Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	21.000.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	591.665.386
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	130.000.000
	Sub Total	Rp.	6.093.665.386
III.	HUTANG	Rp.	----
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.093.665.386

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.